



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telpn (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprosumsel@yahoo.com, Website : www.itprov-sumsel.com

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026 INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu "**Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**", yang mendasari dan menjadi acuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menetapkan tujuan tersebut yaitu good governance sebagai landasan, Inspektorat memiliki peran strategis memastikan prinsip-prinsip tersebut berjalan melalui pengawasan.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2026 :

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah
- 2) Meningkatkan Peran APIP dalam Tata Kelola Pemerintahan
- 3) Meningkatkan peran APIP dalam Pencegahan Korupsi

3. Belanja, Program APBD dan Program APBN

1) Belanja Perangkat Daerah

Total Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 46.138.286.566, yang terdiri atas :

- Belanja operasional : Rp43.996.986.566

Yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp34.058.246.702,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp9.938.739.864,00

- Belanja Modal : Rp2.141.300.000,00

Yang terdiri dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

2) Program dan Anggaran APBD

No	Program	APBD
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp40.859.849.288
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp4.437.221.278
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp841.216.000

3) Program dan Anggaran APBN

Sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka dilakukan Efisiensi terhadap kegiatan yang bersumber dari dana APBN termasuk Dana Dekonsentrasi.

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD)

1) Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra)

- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti
- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
- Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- Nilai capaian pencegahan korupsi / MCSP KPK
- Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

2) Indikator Kinerja Daerah (RPJMD)

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

5. Kegiatan Berdasarkan Kewilayahan

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berlokasi di dalam dan luar provinsi. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Wilayah kegiatan terbatas pada internal Inspektorat Daerah, sedangkan pada Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi lokasi kegiatan mencakup 41 Organisasi Perangkat Daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan juga 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

1. Maksud

Penyusunan laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan triwulan I tahun 2026 diharapkan untuk

memberikan laporan capaian program dan kegiatan serta realisasi pada triwulan I tahun 2026.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai bahan evaluasi dan memantau pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN HINGGA TRIWULAN INI

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2026 pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut:

a) Perbandingan antara Realisasi (Keuangan dan fisik) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah dan DIPA APBN :

Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d.Triwulan ini	Realisasi s.d.Triwulan ini	Target s.d Triwulan ini	Realisasi s.d.Triwulan ini
1	2	3	4	5	6	7
Total Belanja	47.638.286.566	17.891.382.269	50	38,78	50	43.20
-Belanja Operasi	45.496.986.566	17.891.382.269	50	40,67	50	41,67
- Belanja Modal	2.141.300.000	0	50	0	50	0

b) Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat daerah tahun 2026 sbb :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	skor	3,16	-	-
2	Persentase tindak lanjut temuan APIP	%	81	71,1%	87,7%
3	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	75,6	75%	99,2%
4	Level Kapabilitas APIP	Level	3	-	-
5	Persentase Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	75	-	-
6	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Monitoring Controlling Surveillance for Prevention)	Nilai	87	-	-

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a) Kendala

1. Indikator kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bukan hanya kinerja Inspektorat saja tetapi dipengaruhi juga oleh kinerja dari pihak lain / Perangkat Daerah terkait dan dinilai oleh eksternal, sehingga dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik disamping kompetensi dan kecakapan.
2. Banyaknya temuan-temuan BPK, Inspektorat Daerah Provinsi, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga terkait yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan sehingga mempengaruhi Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

b) Tindak Lanjut yang diperlukan

Untuk ke depannya akan dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi ke perangkat daerah dan pihak eksternal terkait lainnya baik terhadap pihak yang dilakukan pembinaan maupun pihak yang melakukan penilaian terhadap capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan dan APBN Tahun Anggaran 2026 untuk dapat menjadi bahan evaluasi per triwulan, selanjutnya **laporan yang lebih terinci menjadi lampiran** pada dokumen ini. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Juli 2026



Inspektur,
Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750617 1995011 001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/ DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat / Pendorong
							(Rp)	%					
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100		40,859,849,288	16,888,914,518	41.33%		APBD	Sumatera Selatan		
I	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	Persen	100		34,058,246,702	14,898,866,507	43.75%		APBD	Sumatera Selatan		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang Bulan	2000	1040	33,880,286,702	14,786,076,507	43.64%	52.00%	APBD	Sumatera Selatan		
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan dan verifikasi yang dibayar	Dokumen	12	9	177,960,000	112,790,000	63.38%	75.00%	APBD	Sumatera Selatan		
II	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai	Persen	100		1,097,529,600	221,060,000	20.14%		APBD	Sumatera Selatan		
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	150	45	807,012,000	203,660,000	25.24%	30.00%	APBD	Sumatera Selatan		
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	45	5	290,517,600	17,400,000	5.99%	11.11%	APBD	Sumatera Selatan		
III	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang tercapai	Persen	100		1,692,817,308	1,086,218,927	64.17%		APBD	Sumatera Selatan		
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	3	3	100,000,000	99,439,239	99.44%	100.00%	APBD	Sumatera Selatan		
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	4	200,000,000	199,495,910	99.75%	100.00%	APBD	Sumatera Selatan		
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	0	130,000,000	0	0.00%	0.00%	APBD	Sumatera Selatan		
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	0	88,000,000	86,789,790	98.62%	100.00%	APBD	Sumatera Selatan		
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	30	12	17,500,000	5,940,000	33.94%	40.00%	APBD	Sumatera Selatan		
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	96	62	1,157,317,308	694,553,988	60.01%	64.58%	APBD	Sumatera Selatan		
IV	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100		360,000,000	291,708,000	81.03%		APBD	Sumatera Selatan		
11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Lapangan yang disediakan	Unit	3	3	360,000,000	291,708,000	81.03%	100.00%	APBD	Sumatera Selatan		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/ DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat / Pendorong
							(Rp)	%					
V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia	Persen	100		1,076,946,718	333,740,234	30.99%		APBD	Sumatera Selatan		
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1	14,520,000	349,000	2.40%	8.33%	APBD	Sumatera Selatan		
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	5	469,026,718	135,711,234	28.93%	41.67%	APBD	Sumatera Selatan		
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	5	593,400,000	197,680,000	33.31%	41.67%	APBD	Sumatera Selatan		
VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Persen	100		2,574,308,960	57,320,850	2.23%		APBD	Sumatera Selatan		
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perzinannya	Unit	23	9	253,008,960	57,320,850	22.66%	39.13%	APBD	Sumatera Selatan		
16	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	5	0	50,000,000	0	0.00%	0.00%	APBD	Sumatera Selatan		
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	60	0	130,000,000	0	0.00%	0.00%	APBD	Sumatera Selatan		
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	2,141,300,000	0	0.00%	0.00%	APBD	Sumatera Selatan		
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah	Persen	100		4,437,221,278	907,469,631	20.45%		APBD	Sumatera Selatan		
VII	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	Persen	100		2,914,482,278	476,951,506	16.36%		APBD	Sumatera Selatan		
19	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Laporan	100	18	771,684,000	62,597,500	8.11%	18.00%	APBD	Sumatera Selatan		
20	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Laporan	100	29	892,988,000	189,350,501	21.20%	29.00%	APBD	Sumatera Selatan		
21	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Laporan	2	2	97,820,000	67,461,800	68.97%	100.00%	APBD	Sumatera Selatan		
22	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Laporan	2	2	102,652,000	56,497,580	55.04%	100.00%				
23	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	45	8	761,154,278	41,574,325	5.46%	17.78%	APBD	Sumatera Selatan		
24	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APPI	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APPI	Dokumen	6	2	288,184,000	59,469,800	20.64%	33.33%	APBD	Sumatera Selatan		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/ DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat / Pendorong
VIII Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu							(Rp)	%					
25	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persen	100		1.522,739,000	430,518,125	28.27%		APBD	Sumatera Selatan		
		Jumlah laporan hasil pengawasan daengan tujuan tertentu	Laporan	135	48	1,522,739,000	430,518,125	28.27%	35.56%	APBD	Sumatera Selatan		
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persen	100		841,216,000	94,998,120	11.29%		APBD	Sumatera Selatan		
IX	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	Persen	100		57,340,000	31,735,020	55.35%		APBD	Sumatera Selatan		
26	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang Fasilitasi pengawasan	Rekomendasi	3	2	57,340,000	31,735,020	55.35%	66.67%	APBD	Sumatera Selatan		
X	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	Persen	100	0	783,876,000	63,263,100	8.07%		APBD	Sumatera Selatan		
27	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Perangkat Daerah	39	6	171,000,000	8,305,000	4.86%	15.38%	APBD	Sumatera Selatan		
28	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi, verifikasi dan penilaian birokrasi	Perangkat Daerah	41	11	301,456,500	46,525,100	15.43%	26.83%	APBD	Sumatera Selatan		
29	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	4	1	120,260,000	933,000	0.78%	25.00%	APBD	Sumatera Selatan		
30	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Perangkat Daerah	4	1	191,159,500	7,500,000	3.92%	25.00%	APBD	Sumatera Selatan		
						46,138,286,566	17,891,382,269	38.78%	43.20%				